

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan milik masyarakat berangsur-angsur menjadi pemukiman, industri atau usaha kebun berorientasi komersil. Karena nilai ekonomi lahan yang semakin meningkat maka *opportunity cost* bagi masyarakat untuk mempertahankan lahannya dalam bentuk hutan rakyat menjadi tinggi, sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan lahannya untuk aktivitas yang lebih menguntungkan. Dalam hal ini konversi terjadi karena perbedaan nilai ekonomi lahan, rente yang kecil dari penggunaan kehutanan mengakibatkan sulit dicegahnya para pemilik lahan untuk mengkonversi lahan berhutannya ke penggunaan lain (Pramono, 2010).

Alih fungsi lahan terus berlangsung sesuai dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, baik untuk mengembangkan permukiman, pemenuhan kebutuhan ekonomi ataupun untuk penggunaan-penggunaan lain. Bertambahnya alih fungsi lahan di suatu daerah biasanya mengikuti perkembangan penduduk setempat. Alih fungsi lahan yang baik seharusnya selain memperhatikan kebutuhan ekonomi juga memperhatikan kelestarian ekologi. Penggunaan lahan yang berlebihan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ekologi biasanya akan menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitarnya.

Di kabupaten Banjarnegara yang merupakan daerah dengan topografi berbukit-bukit, kemiringan yang tinggi dan bervariasi merupakan daerah dengan permasalahan lingkungan yang cukup kompleks. Penggunaan lahan yang berlebihan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan berimbas terhadap semua sektor kehidupan.

Dataran Tinggi Dieng yang merupakan bagian hulu DAS Merawu dan terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah kawasan lindung yang seharusnya merupakan wilayah yang dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat merusak fungsi lindungnya. Namun pada kenyataannya daerah ini dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengeksploitasi lahan secara besar-besaran untuk ditanami tanaman

semusim yaitu kentang. Tanaman kentang merupakan komoditas unggulan bagi petani di Dataran Tinggi Dieng. Tanaman kentang telah menjadi primadona bagi masyarakat di Dataran Tinggi Dieng. Namun karena dalam teknik budidayanya tidak memperhatikan kaidah konservasi maka pembudidayaan komoditas kentang telah mengubah wajah Dataran Tinggi Dieng. Selain itu pola bertanam dengan sistem guludan membujur ke bawah dan tidak melingkar bukit adalah tindakan yang dapat mempercepat erosi. Eksploitasi lahan yang kurang memperhatikan upaya konservasi itu jelas akan merusak ekologi, (Suara Merdeka, 19/06/2006).

Kerusakan lingkungan di daerah hulu yang lebih cepat daripada upaya rehabilitasi menyebabkan akumulasi sedimentasi di Bendungan Mrica kini mencapai 97.929.382 meter kubik. Hal itu mengganggu perputaran turbin pembangkit listrik tenaga air bendungan. Penyumbang terbesar sedimentasi adalah Sungai Merawu yang berhulu di Dataran Tinggi Dieng. Sungai ini memiliki sejumlah anak sungai dengan daerah aliran sungai yang tebingnya rawan longsor sehingga tingkat erosinya tinggi. Selain itu, kerusakan lingkungannya juga sangat tinggi (Indonesia Power, 2011).

Menurut Suripin (2004), daerah pertanian merupakan lahan yang paling rentan terhadap terjadinya proses erosi. Lahan-lahan pertanian yang terus menerus ditanami tanpa istirahat (*fallow*) dan tanpa disertai cara pengelolaan tanaman, tanah dan air yang baik dan tepat, khususnya di daerah-daerah basah dengan curah hujan melebihi 1500 mm pertahun akan mengalami penurunan produktivitas tanah. Penurunan produktivitas ini dapat disebabkan oleh menurunnya kesuburan tanah, dimana unsur hara yang terdapat pada lapisan tanah atas hilang bersamaan dengan terjadinya proses erosi. Bahaya erosi banyak terjadi di daerah-daerah lahan kering terutama yang memiliki kemiringan lereng sekitar 15% atau lebih. Tanah yang kering rentan terhadap erosi terutama adalah tanah Podzolik Merah Kuning dan Latosol terutama tanah-tanah yang tidak tertutup tanaman.

1.1.1 Pengelolaan Hutan Rakyat

Dewasa ini perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk lebih memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat. Hal ini sejalan dengan kondisi dimana Indonesia mengalami defisit kebutuhan kayu bulat (*log*) untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan kayu. Sementara itu produksi kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri pada realisasinya masih

rendah yaitu seluas 1.2 – 1.6 juta ha atau 20% dari target yang ditetapkan (Media Indonesia, 18/12/1999 dalam Nurfatriani dan Triyono, 2002). Oleh karena itu hutan rakyat yang dikembangkan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai komplemen terhadap hutan produksi untuk memasok kebutuhan bahan baku kayu.

Menurut Syahrani (2003), sistem pengelolaan lahan hutan yang direncanakan oleh pemerintah ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dengan berasaskan kelestarian hasil hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis dan berkeadilan sosial. Tujuan pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis dan berkeadilan sosial adalah untuk pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hasil hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dengan memadukan tanaman harian, tahunan dan semusim, petani dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil tanaman tersebut. Hal ini disebabkan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi yang sangat sesuai dengan tujuan/keinginan masyarakat mudah dilakukan dan akan memberikan cukup keuntungan, sehingga bermanfaat untuk dilakukan.

Menurut Simon (1994), pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional atau regional. Di pedesaan peranan kehutanan sangat menonjol karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilan penduduk setempat dan menyediakan bahan baku untuk berbagai macam industri. Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk daerah yang masih terbelakang, pembangunan kesejahteraan masyarakat yang pertama kali perlu dikerjakan adalah memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan, papan, pakaian dan biaya pendidikan.

Manfaat ekonomis yang dapat dihasilkan dari kegiatan pembangunan hutan rakyat adalah dihasilkannya kayu rakyat yang mempunyai nilai ekonomis yang baik sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani (Nurfatriani dan Triyono, 2002).

Salah satu model pengusahaan lahan hutan sekunder dengan pemberdayaan masyarakat lokal adalah *Agroforestry* yang merupakan salah satu model pengusahaan hutan rakyat dengan memadukan komponen tanaman kehutanan dengan komponen tanaman pertanian dengan mengembangkan tanaman kayu lunak seperti Sengon (*Paraserianthes falcataria*) sebagai tanaman utama dan Salak Pondoh sebagai tanaman kedua.

Pemilihan jenis tanaman seperti Sengon dan Salak Pondoh didasarkan pada nilai ekonomi yang banyak disukai dan harga yang cukup tinggi, selain itu tanaman ini cocok dengan kondisi tanah di Kabupaten Banjarnegara. Pengembangan hutan rakyat dilihat dari segi ekonomi selain menguntungkan dalam hal jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi juga menguntungkan dari segi pengelolaan yang membutuhkan biaya lebih kecil dibandingkan pengembangan untuk lahan pertanian.

Menurut Hardjanto (2006), praktek *agroforestry* secara perorangan banyak tersebar di Jawa – Madura dengan perbedaan kombinasi jenis yang ditanam serta pilihan jenis kayu/pohon sebagai jenis dominan. Jenis Sengon/Jeunjing (*Paraserianthes falcataria*) banyak diusahakan pada hutan rakyat di wilayah Jawa Barat pada umumnya, dan sebagian di Jawa Tengah (Haeruman *et al.*, 1986; Haeruman *et al.*, 1990; Soerwiatmoko, 1988; Wahyuningsih, 1993 dalam Hardjanto, 2006). Jenis Jati (*Tectona grandis*) banyak diusahakan di wilayah Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulonprogo (Hardjanto, 2001 dalam Hardjanto, 2006). Sedang jenis *Acacia auriculiformis* banyak diusahakan di Kab. Bangkalan (Widjayanto, 1992 dalam Hardjanto, 2006). Seluruh bentuk *agroforestry* yang menghasilkan kayu tersebut di Jawa lazim disebut hutan rakyat. Hutan rakyat dengan hasil utama berupa kayu rakyat, yang selanjutnya menjadi obyek dalam penelitian ini, memiliki sejarah usaha yang telah berlangsung puluhan tahun.

Pengusahaan kayu rakyat dalam bentuk *Agroforestry* telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, terutama di Jawa. Pada awalnya kayu dari hutan rakyat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagai kayu bakar (90%) dan pertukangan (70%) dan belum menjadi komoditi komersial (Hasil Penelitian IPB, 1976; UGM, 1977). Namun dalam perkembangannya kayu rakyat mampu memenuhi kebutuhan industri pertukangan maupun mebel serta perkapalan baik di tingkat industri kecil, menengah maupun industri padat modal. Dalam kondisi demikian, kayu rakyat telah menjadi alternatif pasokan bahan baku bagi industri pengolahan kayu (Muslich dan Krisdianto, 2006).

Wulansari *et al.*, (2009), mengemukakan bahwa pada prinsipnya pengembangan hutan rakyat memberikan konsep bahwa petani mendapatkan manfaat pada 3 sektor, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selain itu pengembangan hutan rakyat juga bertujuan untuk :

1. Meningkatkan produktifitas lahan
2. Meningkatkan taraf kesejahteraan dengan adanya diversifikasi hasil tanaman

3. Memelihara keserasian lingkungan hidup.
4. Sebagai kegiatan mitigasi terhadap emisi karbon sebagai akibat global warming dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan.

Adanya pabrik pembuatan kayu lapis di Banjarnegara tentu saja mendukung pengembangan hutan rakyat dengan tanaman sengon laut sebagai produk utama, karena dari segi ekonomi masyarakat sudah tidak dipusingkan dengan masalah pemasaran. Keuntungan lain didapatkan dari segi jenis tanaman yang ditanam karena selain tanaman kehutanan juga ditanam tanaman pertanian. Untuk jenis tanaman kehutanan tentu saja harus dilakukan pemanenan dalam jangka waktu yang lama karena merupakan tanaman berkayu dan hasil panen yang diperoleh dalam bentuk kayu. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh juga cukup besar adapun untuk tanaman pertanian biasanya merupakan tanaman musiman dan harian dengan hasil yang bisa dijual atau dimanfaatkan sendiri.

Dilihat dari segi sosial pola pengembangan hutan rakyat ini bisa dikatakan menguntungkan baik dari segi masyarakat pengelola atau pemilik hutan rakyat maupun dari pihak industri. Menguntungkan dari segi sosial bagi masyarakat pemilik atau pengelola hutan rakyat dikarenakan pengelolaan hutan membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan pengelolaan lahan untuk pengembangan pertanian. Hal ini tentu saja akan memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh pengelola atau pemilik hutan rakyat. Di sisi lain pengelolaan hutan rakyat akan menopang perkembangan dan kemajuan kegiatan industri kayu lapis yang akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Data Ditjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tahun 2010, memperlihatkan setidaknya ada 56 unit industri pengolahan hasil hutan (IPHH) di Indonesia yang mengandalkan kayu dari hutan rakyat sebagai sumber bahan baku dengan total nilai investasi mencapai 2,31 triliun rupiah. Industri ini menyerap tenaga kerja langsung mencapai 21.300 orang. Derap industri berbasis kayu rakyat juga bisa dilihat dari makin meningkatnya serapan bahan baku kayu yang berasal dari hutan rakyat. Untuk tahun 2010, catatan sampai triwulan ketiga, industri memanfaatkan 2,086 juta m³ kayu yang berasal dari hutan rakyat. Naik dibandingkan catatan periode yang sama tahun sebelumnya yang 1,9 juta m³ (Anonim, 2011) .

Pengelolaan hutan rakyat diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas lingkungan maupun antisipasi terhadap permasalahan global warming. Kabupaten Banjarnegara dengan topografi berbukit-bukit dan memiliki tingkat kemiringan yang

tinggi dan bervariasi merupakan daerah dengan permasalahan lingkungan yang cukup kompleks. Pengelolaan hutan rakyat dengan sistem *Agroforestry* di Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan untuk mengatasi permasalahan lingkungan menyangkut erosi yang menyebabkan peningkatan sedimentasi di Bendungan Soedirman.

1.2 Rumusan Masalah

Kegiatan pemanfaatan lahan yang kurang bijaksana oleh penduduk desa di sekitar kawasan sungai Merawu dan Serayu telah menyebabkan erosi yang berakibat pada menumpuknya sedimen di Bendungan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Pengelolaan *Agroforestry* di Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu upaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, yang juga merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi, yaitu peningkatan sedimentasi di Bendungan Soedirman. Melihat aspek-aspek yang ada dan kondisi yang terjadi, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana pengelolaan *Agroforestry* memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat, melalui penelitian dengan judul : “Dampak Pengelolaan *Agroforestry* di Kabupaten Banjarnegara”.

Esensi permasalahan yang dapat diambil dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan pada bagian latar belakang adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan *Agroforestry* di Kabupaten Banjarnegara?
2. Apa dampak dari pelaksanaan pengelolaan *Agroforestry* di Kabupaten Banjarnegara?

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan *Agroforestry* di Kabupaten Banjarnegara.
2. Mengetahui dampak dari pelaksanaan pengelolaan *Agroforestry* di Kabupaten Banjarnegara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan gambaran usaha peningkatan kualitas lingkungan dengan pendekatan peningkatan perekonomian melalui upaya pengelolaan *Agroforestry*.

b. Bagi Pengelola Hutan Rakyat

Memberikan masukan kepada unit manajemen dalam pengelolaan *Agroforestry* agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan tanpa mengesampingkan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh.

d. Bagi Kemajuan Ilmu

Memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan *Agroforestry* khususnya dalam peningkatan kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat